

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Teks

Abu Daud Busroh. 1983. *Asas – Asas Hukum Tata Negara*. Ghalia, Jakarta.

\_\_\_\_\_. 1994. *Capita Selecta Hukum Tata Negara*. Rhineka Cipta, Jakarta.

Abdul Latief. 2006. *Hukum Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*. Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.

Abdul Razak. 2005. *Peraturan Kebijakan sebagai Instrumen Pemerintahan*. Jurnal Amannagappa. Vol 13. Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Achmad Ruslan. 2005. *Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan dan Kualitas Produknya : Kajian atas Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Sulawesi Selatan*. Disertasi pada program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Afrizal. 2003. *Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang – Undang*. Tesis pada program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Ann Seidman dan Robert Seidman. 2002. *Penyusunan Rancangan Undang – Undang dalam Perubahan Masyarakat Demokratis*. ELIPS USAID.

Bagir Manan. 1992. *Dasar – Dasar Perundangan – Undangan Indonesia*. Ind Hill co. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Tingkat Daerah*. Lppm Unisba, Bandung.

\_\_\_\_\_ dan Kuntana Maknar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni, Bandung.

Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Presindo, Jakarta.

- Dawan Raharjo. M. 1998. *Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) Eseit Ekonomi Politik*, Jakarta.
- Didi Nasmi Yunas. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya, Jakarta.
- Edi Suharto. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Eddi Wibowo dan Hessel Nogi Tangkilan. S. 2004. *Seni Membangun Kepemimpinan Publik*. BPFIC, Yogyakarta.
- Erni Setyowati. 2003. *Bagaimana Undang – Undang Dibuat* (dalam proses penerbitan). Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2003. *Konsolidasi Naskah Undang – Undang Dasar 1945 setelah Perubahan Keempat*. Yarsif Watampone, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Konstitusi dan Konstisionalisme*. Sekjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance (telaah dari dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*. Insan Cendikia, Surabaya.
- Meriam Budiarto. 1988. *Partisipasi Politik dan Partai Politik*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Muin Fahmal. 2006. *Peran Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. UII Pres, Yogyakarta.
- Nasroem. M. 1986. *Asal Mula Negara*. Aksara Baru, Jakarta.
- Nyoman Sumaryadi. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama, Jakarta.
- Pangerang Moenta. A. 2003. *Metode Perancangan Perundang – Undangan Daerah*. Jurnal Amanna Gappa Volume II Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Jakarta.

- \_\_\_\_\_. 1992. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Rosidi Rangga Wijaya. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang – Undangan Indonesia*. CV Mandiri Maju. Bandung.
- Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarundajang. 2003. *Birokrasi dalam Otonomi Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Siswanto Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soehmo. 2001. *Hukum Tata Negara Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang – Undang No. 22 Tahun 1999*. BPFEE, Yogyakarta.
- Supardan Modeong. 2003. *Teknik Perundang – Undangan di Indonesia*. Perca, Jakarta.
- Utama Sandjaja. P. 2005. *Partnership for Governance Reform (kemitraan) Workshoop Susduk Parlemen*. 25 – 26 Mei, Makassar.
- Warsita Utomo. 2006. *Administrasi Publik Baru Indonesia : Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wirjono Pradjodikoro. 1981. *Asas – Asas Ilmu Negara dan Ilmu Politik*. Eresco, Jakarta.
- Zairin Harahap. 1997. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Revisi. Raja Grafika Persada. Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang – Undagan**

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003  
Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang  
Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 Tentang  
Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang – Undang.

Beberapa Sudut Pandang Tentang Tata Pemerintahan Daerah Ditinjau  
dari Aspek Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif oleh  
Lembaga Pemantau Pelaksana Peraturan Daerah tentang  
Transparansi Pemerintahan dan Partisipasi Publik.